

ABSTRAK

Pengawasan di dalam hubungan antara pusat dan daerah khususnya mengenai tidak dapat dipisahkan. Dengan adanya pengawasan yang ideal maka pelaksanaan otonomi akan berjalan dengan baik, pemerintah pusat dapat memastikan bahwa kebijakan-kebijakan khususnya peraturan daerah yang terjadi di daerah tidak akan menentang atau mengganggu jalannya kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat dan di sisi lain pemerintah daerah juga mendapatkan kebebasan atau kemandirian untuk mengurus wilayahnya sendiri. Fungsi pengawasan yang selama ini berjalan juga bersifat dinamis sehingga terdapat perubahan-perubahan khususnya setelah dilakukannya uji materiil di Mahkamah Konstitusi mengenai fungsi pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah pusat melalui Kemendagri yang tentunya juga berdampak terhadap pengawasan yang dapat diterapkan kembali kepada daerah khususnya dalam hal peraturan daerah. Untuk itu metode yang diterapkan dalam penelitian mengenai fungsi pengawasan ini adalah yuridis normatif. Penelitian ini kemudian menghasilkan bahwa terjadi perubahan dalam hal pembatalan peraturan daerah akibat terbitnya Putusan MK tersebut dan adanya potensi tumpang tindih antar lembaga berwenang yang melakukan pengawasan terhadap daerah khususnya peraturan daerah dan juga tindakan apa yang seharusnya dilakukan untuk mengatasi masalah tersebut. Pemerintah diharapkan membuat pengaturan lanjutan yang lebih jelas mengenai batas-batas kewenangan antar lembaga tersebut dalam melakukan pengawasan preventif tanpa menentang hasil Putusan yang dibuat oleh Mahkamah Konstitusi.

Kata Kunci: Pengawasan, Peraturan Daerah, Putusan MK, Politik Hukum.

ABSTRACT

Supervision in the relationship between the center and the regions, especially regarding autonomy, cannot be separated. With ideal supervision, the implementation of autonomy will run well, the central government can ensure that policies, especially regional regulations that occur in the regions will not oppose or interfere with the course of policies set by the central government and on the other hand, local governments also get freedom or independence to manage their territory. The supervisory function that has been running so far is also dynamic so there are changes, especially after the judicial review at the Constitutional Court regarding the supervisory function carried out by the central government through the Ministry of Home Affairs which of course also has an impact on supervision that can be re-applied to regions, especially in terms of regional regulations. For this reason, the method applied in the research on this supervisory function is normative juridical. This research then results that there has been a change in the cancellation of regional regulations due to the issuance of the Constitutional Court's Decision and the potential for overlap between authorized institutions that carry out supervision of regions, especially regional regulations, and also what actions should be taken to overcome these problems. The government is expected to make clearer follow-up arrangements regarding the limits of authority between these institutions in carrying out preventive supervision without contradicting the decisions made by the Constitutional Court.

Keywords: Supervision, Regional Regulations, Constitutional Court Decisions, Legal Politics.